

BAB I

PENDAHULUAN

Skripsi ini akan membahas tentang Kebijakan Amerika Serikat dimasa pemerintahan Donald Trump Terhadap Isu Imigran Muslim. Dalam setiap pemberitaan mengenai Islam yang pada akhirnya opini masyarakat pun terbentuk dengan Islamophobia. Penulis menggunakan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri dalam kajian ini untuk melihat dampak politik dari kebijakan yang diambil oleh Trump. Kepentingan Nasional dapat dilihat dari bagaimana keamanan Nasional Amerika Serikat untuk satu tujuan utama yaitu menciptakan Amerika Serikat yang berjaya kembali. Hasil dari kajian ini melihat bahwa kontroversi kebijakan Donald Trump ini berdampak pada politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, serta konteks internasional.

A. LatarBelakangMasalah

Amerika Serikat adalah negara adidaya yang mempunyai peran dominan di kancah perpolitikan internasional baik dalam mempengaruhi peristiwa-peristiwa global maupun lebih jauh dalam mengambil keputusan di dunia internasional. Ibu kota Amerika Serikat terletak di Washington D.C dan negara ini berbentuk federasi yang terdiri dari 50

negara bagian (Sopian, 2016). Sistem pemerintahan Amerika Serikat yaitu Republik Federal yang telah menjadikan AS memiliki kekuatan militer, ekonomi, dan kekuatan politik serta teknologi yang maju.

Saat ini Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Trump yang merupakan presiden ke-45, Amerika Serikat memiliki dua partai politik yaitu Demokrat dan Republik. Adanya dua kekuatan yang besar dalam pemilu saat itu membuat beberapa negara di dunia menjadi kebingungan dengan kampanye kampanye Donald Trump yang sangat kontroversial yang salah satu diantaranya akan membuat pembatasan bagi imigran ke Amerika Serikat dan juga masalah pembangunan tembok diperbatasan Meksiko-Amerika Serikat, hal ini tentu saja menimbulkan reaksi yang beragam dari negara negara di dunia.

Dengan adanya peningkatan masalah isu imigran di Amerika Serikat, tentu saja banyak menimbulkan ancaman yang besar terhadap kriminalitas dan teror di negara itu. Bagi Amerika isu masalah imigran mendapatkan perhatian khusus yang sudah tertata dan terkontruksi karena amerika serikat merasa dari sisi keamanan negara mulai terancam.

Amerika Serikat memiliki jumlah imigran yang lebih besar dibandingkan

dengan negara-negara lain. Jumlah imigran yang ada di Amerika Serikat menurut PBB diperkirakan mencapai 46,6 juta imigran yang ada di Amerika Serikat, dan mayoritas imigran yang ada di Amerika Serikat kebanyakan berasal dari Meksiko, jalur migrasi terbesar di dunia adalah jalur Amerika Serikat-Meksiko. Keberadaan imigran di Amerika Serikat menjadikan negara tersebut sebagai negara imigran, tentu saja hal ini memunculkan kebijakan imigrasi yang membatasi di era kepemimpinan Donald Trump terutama dalam menanggapi masalah imigran.

Trump membuat kebijakan baru terkait masalah imigrasi dan kontrol perbatasan. Kebijakan tersebut menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk lebih menjaga dengan ketat perbatasan yang selama ini menjadi pintu masuk bagi ratusan ribu imigran. Di dalam kebijakannya, Amerika Serikat mengambil tindakan tegas dalam menanggapi para imigran tersebut yaitu dengan membangun tembok dan meningkatkan keamanan di perbatasan, selain itu Amerika Serikat juga menekankan adanya tindakan hukum yang tegas terkait imigrasi diperbatasan.

Melalui kebijakan Zero Tolerance yang bertujuan untuk menghalangi masuknya imigran gelap, Amerika Serikat memberikan kewenangan kepada pemerintah federal untuk memberikan

sangsi hukum pidana kepada para imigran gelap tersebut. Pada dasarnya kebijakan ini bertujuan membuat keamanan negara Amerika Serikat, dengan demikian dapat dilihat bahwa kecenderungan dalam kebijakan imigrasi Amerika Serikat terhadap imigran gelap memunculkan suatu tren baru di tengah masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Adapun kecenderungan tersebut memprioritaskan kepentingan penduduk asli yang harus dilindungi dari keberadaan imigran.

Oleh karena itu, setelah kemenangan presiden Amerika Serikat oleh Donald Trump pada tahun 2016, isu imigran menjadi semakin berkembang. Dalam beberapa kesempatan melalui pidatonya yang dilakukan oleh Donald Trump juga menunjukkan bahwa isu imigran menjadi perhatian yang cukup serius bagi Amerika Serikat. Dimana hal ini mendorong Donald Trump untuk merancang dan memberlakukan kebijakan baru dalam imigrasi. Salah satu tindakan pertama Presiden Donald Trump memberlakukan penerapan kebijakan Travel Ban. Travel Ban merupakan kebijakan yang dibuat secara sepihak oleh Donald Trump atas inisiasinya sendiri sebagai perintah eksekutif atau keputusan presiden. Perintah eksekutif Donald Trump dikeluarkan pada bulan Maret 2017. Istilah Travel Ban dipandang sebagai langkah sekuritisasi yang memicu

munculnya peluang propaganda. Donald Trump juga menanggukkan program penerimaan pengungsi Amerika Serikat atau United States Refugee Admissions Program. Kemudian, membatasi jumlah kedatangan yang diizinkan pada tahun 2017. Dalam kebijakan Travel Ban ini dipandang sebagai langkah sekuritisasi oleh Amerika Serikat.

Keputusan larangan perjalanan Donald Trump adalah penggunaan kekuatan eksekutif yang bertujuan untuk memperkuat keamanan di Amerika Serikat dengan menjadikan keamanan nasionalnya sebagai upaya untuk membenarkan undang-undang imigrasi di Amerika Serikat. Di sisi lain dengan adanya dukungan Mahkamah Agung terhadap penegakan kebijakan tersebut. Implementasi perintah eksekutif Donald Trump mulai menimbulkan kekacauan secara substansial dalam industri perjalanan Amerika Serikat, Meskipun kebijakan Travel Ban yang diterapkan oleh Donald Trump telah menuai protes, kemarahan bahkan dianggap sebagai kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Amerika Serikat. Namun, disisi lain Donald Trump tetap menjadikan kebijakan ini sebagai langkah sekuritisasi oleh Amerika Serikat.

Demi untuk kepentingan dalam negeri Amerika Serikat, pemimpin negeri paman sam tersebut memiliki beberapa

kebijakan yang menurutnya dapat membawa Amerika Serikat akan lebih diakui oleh dunia walaupun banyak menuai kontroversi dari negara-negara lain ataupun rakyat Amerika Serikat itu sendiri, Trump mengatakan;

“Until we are able to determine and understand this problem and the dangerous threat it poses, our country can not be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life.” (The Atlantic.com, 2015).

Larangan masuknya imigran muslim ke Amerika Serikat sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam sebuah negara. Dengan menggunakan politik konfrontatif Donald Trump memiliki tujuan untuk membenahi Amerika Serikat dimulai dari internal negaranya dan protektif terhadap warga negaranya. Hal itu merupakan bagian yang disebut dengan implementasi hakikat kedaulatan negara. Akan tetapi kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang telah diakui secara universal karena merupakan norma dasar internasional yang tidak boleh dilanggar negara manapun walau dengan alasan kedaulatan (Natsif, 2018).

Dengan adanya larangan imigrasi yang diberlakukan oleh Donald Trump

muncul kecaman dari sejumlah pemimpin dunia dan tokoh pemerintahan, hal ini tentu saja membuat hubungan Amerika Serikat dengan masyarakat internasional menjadi renggang. Menurut CAIR, kebijakan Trump tidak akan membuat Amerika Serikat aman, melainkan akan melahirkan ketegangan dan mempertegas *Islamofhobi* di Amerika Serikat serta melahirkan stigma melawan teroris yang diidentikkan dengan negara-negara mayoritas Muslim (Khan, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah, yaitu “Mengapa Donald Trump Membuat Kebijakan yang Bersifat menolak Terhadap Imigran Muslim yang berada di Amerika Serikat dan apa dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan tersebut.

C. Kerangka Teoritik

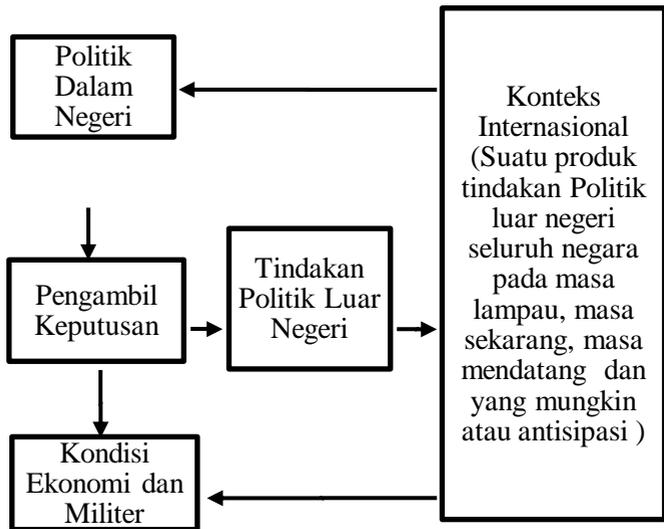
Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri

Fenomena pembuatan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap imigran muslim yang berada di Amerika Serikat pada era Donald Trump ini dapat dijelaskan dengan teori pembuatan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin. Esensi kebijakan luar negeri harus

mengandung kepentingan nasional negara, dari teori ini dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur kebijakan luar negeri yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan kebijakan luar negeri. Seperti yang disebutkan oleh Coplin dalam bukunya tentang Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Luar Negeri, itu menulis bahwa:

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision.... On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in system.” (Coplin, 2003).

William D. Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, dan konteks internasional. Dengan dibuatnya bagan dibawah ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman mengenai teori ini .



Bagan 1 : Teori Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri Oleh Wiliam D.Coplin

a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Coplin mengatakan bahwa, kondisi politik dalam negeri memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara serta didalamnya terdapat asumsi mengenai perbedaan mendasar dan bersifat lintas nasional. Setiap kebijakan luar negeri merupakan kelanjutan dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam situasi dan kondisi tertentu. Situasi politik

dalam negeri artinya interaksi antar pengambil keputusan luar negeri dengan elit politik dalam negeri atau disebut dengan “*policyinfluencers*”. Hubungan aktor-aktor dalam negeri dengan pengambil keputusan luar negeri disebut “*policyinfluencesystem*”. *Policyinfluencer* sangat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Coplin juga mengatakan bahwa ada 4 tipe “*policyinfluencer*” yaitu birokrat, partai, kepentingan, dan massa (Coplin, 2003).

Kebijakan yang diambil Trump dalam menghadapi imigran muslim di Amerika Serikat merujuk kepada tipe opini publik atau *massinfluencers* yang mengacu pada iklim opini yang dimiliki oleh populasi yang dipertimbangkan oleh para pengambil keputusan pada saat menyusun politik luar negeri. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengumumkan bahwa pelarangan imigran masuk adalah hasil dari keengganan atau ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk mematuhi manajemen identitas Amerika Serikat, baik dalam hal berbagi informasi, keamanan nasional dan kriteria penilaian keselamatan publik.

Kebijakan Trump untuk melarang imigran muslim untuk masuk ke Amerika Serikat didasari oleh kepentingan publik yang membutuhkan perlindungan dan keamanan. Presiden Trump berdalih kebijakan tersebut ditempuh demi keamanan nasional Amerika Serikat untuk

mencegah aksi terorisme di Amerika Serikat. Pemerintahan Trump menegaskan kebijakan itu bukan diskriminasi terhadap muslim. Fokus kebijakan tersebut adalah negara-negara yang menjadi tempat berkembangnya terorisme, yang kebetulan mayoritas warga negaranya muslim. Trump berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk keselamatan dan keamanan Amerika Serikat.

b. Kondisi Ekonomi dan Militer

Dalam pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara, kondisi ekonomi dan militer memiliki peranan yang penting didalamnya. Suatu negara harus diimbangi oleh kekuatan pertahanan dan keamanan serta bersedia untuk menciptakan kemampuan yang diperlukan untuk menegakkan politik luar negerinya. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan kekuatan ekonomi dan militer, serta kelemahan negaranya ketika menyusun politik luar negeri. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan komitmen dan kemampuannya dengan memahami keterbatasan-keterbatasannya, yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan militer (Coplin, 2003).

Dalam sebuah negara, ekonomi dan militer adalah kekuatan dalam negeri.

Faktor utama dalam menentukan ekonomi sebuah negara, diantaranya perkapita dan neraca pembayaran. Ekonomi dikatakan kuat atau lemah hal ini dapat dilihat dari GNP (*Gross National Product*) suatu negara. Sedangkan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan militer suatu negara dapat dilihat dari seberapa besar kapasitas penggunaan kekuatan militer, tingkat ketergantungan kepada negara lain dan kestabilan internal suatu negara. Dengan mempertimbangkan semua faktor di atas, Coplin berpendapat negara dibagi menjadi dua kategori yaitu, negara maju dan negara terbelakang.

Negara dengan angkatan senjata konvensional yang terlatih dengan baik serta memiliki GNP yang relatif sangat tinggi dengan berbagai kapasitas produksi yang bervariasi, dan seberapa sering negara tersebut terlibat dalam perdagangan internasional maka negara tersebut dikatakan dengan negara maju. Sedangkan negara terbelakang memiliki GNP yang relatif rendah dengan ekonomi yang bergantung pada negara lain, bantuan negara lain dan angkatan senjata yang tidak terlatih, serta sedikitnya pasukan militer tentu saja akan mempengaruhi tingkat kestabilan negara dengan tidak baik dan tidak seimbang.

Perbedaan antar negara maju dan terbelakang ini akan membedakan kebijakan luar negeri yang diambilnya.

Negara maju memiliki kemampuan militer untuk menyerang negara terbelakang dan mampu untuk memanipulasi ekonomi negara terbelakang. Sehingga negara maju dengan persenjataan yang modern didukung pasukan yang terlatih dalam jumlah besar akan lebih unggul apabila perang akan dilakukan.

Ketika menganalisa kekuatan ekonomi dan militer Amerika Serikat, dapat diketahui bahwa Amerika Serikat merupakan negara maju. Untuk mengambil kebijakan dalam pembatasan masuknya imigran dari 7 negara muslim sebagai negara maju mampu melakukan hal tersebut tanpa harus takut dengan konsekuensi yang akan terjadi. Walaupun hal ini akan mendapat kecaman dari dunia internasional serta akan ada beberapa faktor yang nantinya dapat berpengaruh terhadap melemahnya perekonomian dan kondisi militer dalam negeri Amerika Serikat itu sendiri (Retnachrista, 2003).

c. Konteks Internasional

Konteks internasional merupakan tindakan suatu negara untuk mempengaruhi negara lain untuk mencapai kepentingan tertentu. Coplin mengatakan bahwa ada 3 elemen dalam konteks internasional. Ketiga elemen tersebut yaitu geografis, ekonomis dan politis. Setiap negara memiliki lingkungan internasionalnya sendiri seperti lokasi

yang didudukinya, selain itu terdapat hubungan ekonomi dan juga politik antara negara yang satu dengan negara yang lainnya (Coplin, 2003).

Dengan adanya serangan teroris ke gedung World Trade Center (WTC) dan pentagon di amerika serikat pada tanggal 11 September 2001, dunia internasional dihadapkan dengan tantangan untuk memeranggi terorisme. Dari terorisme ini, Amerika Serikat kemudian menaruh perhatian yang besar terhadap dunia islam yang negara tersebut dianggap sebagai "lahan" dari tumbuhnya gerakan teroris.

Sejak terjadinya peristiwa 11 September 2001, isu terorisme semakin meluas dan menjadi bayang-bayang bagi seluruh negara di dunia serta menjadi topik penting dalam permasalahan dunia internasional. Serangan yang terjadi di gedung WTC yang di anggap sebagai salah satu kekuatan Amerika Serikat, seolah menegaskan bahwa terorisme sangat berbahaya bagi keamanan negara dan dunia internasional. Amerika Serikat sebagai negara yg menjadi korban dalam serangan tersebut kemudian berusaha melakukan *inter-subjectivitydiscourse* dengan menyebarkan gagasan-gagasan perlawanan terhadap terorisme, gagasan Amerika ini pun mendapatkan perhatian dari banyak negara negara di dunia dan berhasil menjadikan wacana perang melawan terorisme (war on

terror) menjadi sebuah norma internasional yang di legitimasi oleh negara-negara dunia. Melakukan perlawanan terhadap tindak terorisme adalah gerakan yang wajib di lakukan oleh setiap negara karena terbentuknya norma internasional terait kontra-terorisme ini.

Sebuah norma termasuk waronterror hanya akan berkembang ketika negara yang memiliki kekuasaan besar menggunakannya untuk menekan negara-negara lain secara bersama-sama untuk mengadopsi norma tersebut (Kusuma, 2019). Dalam praktiknya Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya mendapatkan kritik terhadap pembentukan norma internasional waronterror dengan melihat dari nilai-nilai liberal seperti kebebasan, karena apa yang telah Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lakukan justru bertentangan dengan nilai-nilai liberalisme salah satunya dengan membatasi masuknya imigran muslim ke Amerika Serikat (Rashmi, 2015).

Teori tersebut yang menjadi dasar Presiden Donald Trump untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi imigran muslim. Donald Trump menjanjikan kepada pendukungnya dalam suatu kampanye untuk melarang imigran dari Timur Tengah masuk ke Amerika Serikat, karena telah mengancam keamanan dalam negeri (*security*

homeland) Amerika Serikat. Trump menyatakan ambisinya bahwa;

“our country cannot be the victims of horrendous attacks by people that believe only in Jihad, and have no sense of reason or respect for human life. If I win the election for President, we are going to Make America Great Again.” (donaldjtrump.com, 2017).

Pidato Donald Trump tersebut menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Trump didorong oleh faktor kondisi politik dalam negeri dimana sebelumnya terdapat banyak tindakan radikalisme yang membahayakan warga Amerika Serikat seperti kejadian 11 September yang menyisakan trauma untuk sebagian masyarakat Amerika Serikat. Faktor selanjutnya yang mendorong Trump mengeluarkan kebijakan ialah faktor kondisi ekonomi dan militer menurut Jaksa Agung Jeff Sessions bahwa imigran menurunkan pendapatan orang Amerika, terlalu banyak pekerja imigran berketerampilan rendah memasuki Amerika, sehingga merugikan pekerjaan dan menurunkan upah orang Amerika serta ketakutan Donald Trump terhadap terorisme yang dapat mengancam kedaulatan Amerika Serikat (Kelly, 2017). Faktor ketiga yaitu faktor konteks internasional yang dimana ISIS “*Islamic State of Iraq and Syria*” merupakan organisasi teroris yang dianggap

berbahaya oleh Donald Trump, seperti yang telah diungkapkan Donald Trump *"Refugees from Syria are now pouring into our great country. Who knows who they are? Some could be ISIS. Is our president insane?"*. Menurut Donald Trump imigran dapat saja mereka adalah ISIS yang berbahaya bagi Amerika Serikat ketakutannya Donald Trump terhadap kegiatan terorisme yang besar mendorong Donald Trump untuk membuat kebijakan terhadap pembatasan masuknya imigran muslim di Amerika Serikat (Khan, 2019).

Trump akhirnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru terhadap imigran Muslim pada masa pemerintahannya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump untuk imigran muslim disebut dengan istilah "perintah eksekutif 13769", dimana kebijakan tersebut berisi tentang pelarangan terhadap warga muslim dari 7 negara untuk masuk ke wilayah Amerika Serikat.

D. Hipotesis

Preiden Donald Trump membuat Kebijakan yang menolak masuknya Imigran Muslim ke Amerika Serikat, karena: pertama, didasari oleh kepentingan publik yang membutuhkan perlindungan dan keamanan negara Amerika Serikat,

kedua, para imigran muslim dianggap kelompok yang berpotensi mengambil pekerjaan penduduk asli Amerika Serikat, adapun yang ketiga, isu imigran muslim di Amerika Serikat memicu munculnya potensi bagi tindak kriminal dan teror, serta yang ke empat ingin menjaga Amerika Serikat dari ancaman terorisme.

E. Metode Penelitian

Untuk menjelaskan perubahan kebijakan dalam mengatasi isu imigran Muslim di era kepemimpinan Donald Trump, penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah metode yang tidak berfokus kepada ilmu eksak yang berupa angka ataupun statistik. Dalam metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskriptif holistik, yang menjelaskan secara detil tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang (Wahab, 2016).

Pada metode penelitian kualitatif ditunjang dengan berbagai sumber seperti literatur, skema, gambar dan lain-lain. Sedangkan metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dan

lebih memusatkan perhatian kepada masalah-masalah bagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif (Nazir, 2005).

Metode deskriptif kualitatif ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena dan karakteristiknya serta untuk mengumpulkan informasi yang lebih terperinci, mengidentifikasi sebuah masalah, melakukan perbandingan atau evaluasi serta mengungkap sebuah fakta, fenomena, variabel, dan keadaan terjadi ketika penelitian dilakukan. Metode deskriptif kualitatif ini berfokus pada bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi. Metode pengumpulan data dalam penelitian deskriptif menggunakan observasi dan survey dengan melibatkan eksplorasi induktif dalam analisis data untuk mengidentifikasi tema, pola, atau konsep yang berulang dan kemudian menggambarkan dan menafsirkan kategori tersebut (Sugiono, 2008).

Metode pengumpulan data dilakukan dilakukan dengan melibatkan metode akumulasi sekunder yang berarti mengumpulkan data dengan menggunakan referensi dari berbagai literature seperti buku, jurnal, buku elektronik, Koran, majalah, notasi, dan lain-lain (Nassaji, 2015). Metode ini di gunakan oleh penulis

untuk mengumpulkan data yang penulis inginkan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pembatasan masuknya imigran Muslim di bawah kepemimpinan Donald Trump.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengapa Donald Trump membuat kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap imigran Muslim yang akan masuk ke Amerika Serikat dilihat dan dijelaskan melalui tiga elemen yaitu kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta yang terakhir konteks internasional yang mempengaruhinya ketika mengeluarkan kebijakan pembatasan masuknya imigran Muslim ke Amerika Serikat.

G. Jangkauan Penelitian

Agar penelitian ini lebih fokus, penulis membuat batasan penelitian pada masa pemerintahan presiden Donald Trump pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adanya salah satu kebijakan yang diambil yaitu pelarangan imigran Muslim di Amerika Serikat yang semakin populer mengundang reaksi dari negara-negara di dunia.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini dibagi menjadi 3 bagian yang saling berhubungan, yaitu:

Bab 1 berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 pada bagian ini menjelaskan tentang imigran muslim di Amerika Serikat dan bagaimana terjadinya pengekangan terhadap imigran muslim, yang berdasarkan dari alasan politik dalam negeri, alasan ekonomi, faktor internasional dan pembuatan keputusan. Kemudian juga menjelaskan Alasan penolak pelarangan imigran muslim ke Amerika Serikat.

Bab 3, Berisi kesimpulan dari paparan bab I dan II tentang kebijakan pelarangan imigran muslim yang dibuat oleh Donald Trump tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer serta konteks internasional Amerika Serikat.